

Persyaratan perizinan, perizinan yang diterbitkan oleh unit organisasinya

<https://perizinan.kkp.go.id>

**LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**
SUBSEKTOR PENANGKAPAN DAN PENGANGKUTAN IKAN

PROFILLAYANANSTANDAR LAYANANPUBLIKASIPITFAQ

Info TerkiniPanduan e-PIT WebPanduan Penyampaian LKUPanduan Perpanjangan SIUPPanduan Perpanjangan SIPI/SIKPI

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAR www.kkp.go.id SUREL surel@kkp.go.id

Yth.

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi seluruh Indonesia
3. Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan
4. Pelaku usaha subsektor pengangkutan ikan

SURAT EDARAN
NOMOR B.1418/DJPT/HK.410/XI/2025

TENTANG
PEMBARUAN PRODUK LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN SUBSEKTOR PENGANGKUTAN IKAN

Dalam rangka menyamakan pemahaman pemangku kepentingan terhadap produk layanan perizinan berusaha dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhitung mulai tanggal 10 November 2025, Surat Ijin Usaha Perikanan

Surat Edaran Nomor B.1418/DJPT/HK.410/XI/2025

...selengkapnya

Senin, 10 November 2025

LIHAT BERITA LAIN

**KEMENTERIAN INVESTASI DAN KEWIRAUSAHAAN**
Nomor: A/SA.00.10026
Tgl: 06 November 2025
Lampiran: 1
Hal: 1
Penerima: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Indonesia
Penerima: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi seluruh Indonesia
Penerima: Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan
Penerima: Pelaku usaha subsektor pengangkutan ikan

Penyampaian Masa Peralihan Sistem OSS RBA berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tahap Kedua

Jumat, 07 November 2025

Perpanjangan perizinan berusaha Dapat Diajukan Paling Cepat Satu Bulan Sebelum Perizinan Berusaha Berakhir



KKP Tegaskan PNPB SDA Perikanan Wujud Keadilan Usaha

Senin, 21 Juli 2025



Satgassus Polri Dukung KKP Capai Target Penerimaan Negara Sektor Perikanan Tangkap

Jumat, 04 Juli 2025

**PIAGAM PENGHARGAAN**
PENGHARGAAN PRESTASI PELAYANAN KUPAT PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK (OPRI) PENGHARGAAN PENTOLONGAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN